

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kenedi, J., *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 1-2.
- Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-13, 2018), hlm. 207.
- Vera Rimbawani "*Buku Ajaran Hukum Perjanjian*", UBHARA Press, Surabaya, 2020, hlm. 9.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2018, hlm. 114.
- Haris Budiman, *Hukum Tata Ruang Rekontruksi Kebijakan di Daerah*, YK Publishing, Kuningan, 2022, hlm. 11.
- Fitri Dewi navisya, "*Mitigasi Risiko Politik Dalam Investasi Penanaman Modal*" . Thalibul Ilmi Publishing & Education. Cet. Ke-1, Gresik, 2022. Hlm. 32.
- Suparji, "*Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*". (Jakarta Selatan : UAI Press 2016). Hlm. 3.

Jurnal

- Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "*Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*," Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (15 Oktober 2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Fikri Azmi, Iswandi Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi Luar Kota, dan Muaro Jambi, "*Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi*" Limbago : Journal of Constitutional Law, vol. 3 (2023)
- Mai Puspadya Bilyastuti "*Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo*

Dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)” Jurnal Universitas Tribhhuwana Tungadewi Vol 9 No 1 (2019)

Regita Ardhya. Mahasani, “*Intergovernmental Relations Dalam Pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.*” Jurnal Repositori Unisma Bekasi 10, (2023)

Hadiyanti, Budiman, H., dan Dialog, B. L, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Jalan Di Kabupaten Kuningan.,*” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018).

Haris Budiman, “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Di Kabupaten Kuningan the formulation of the problem How the Human Rights Arrangements in Spatial Planning in Indonesia and How Regional Policies in Spatial Planning in Protecting Human Rights of the Community of Kuningan,*” Unifikasi-Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4, No 1 (2019)

Janpatar Simamora, “*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*” Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No. 3 Tahun 2019

Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer,*” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 1, no. 1 (2021): 46–68

Maulana Rifqi dan Mujamir, “*Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan,*” Jurnal Justisia 3, no. 1 (2018). Hal. 90

Bias Lintang Dialog, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet.,*” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2015).

P Purwanto, “*Restrukturisasi Pelayanan Perizinan untuk Menciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.,*” Spektrum Hukum 17, no. 1 (2020).

- Tasbir Rais “*Negara Hukum Indonesia : Gagasan dan Penerapannya*” Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 16.
- Vernanda Yuniar “ *Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007*” Lex Administratum Vol VII, No 2, Hal 64, 2019
- Danel Aditian “ *Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*”, Ensiklopedia Education Review, Vol 4, No 3, 2022. Hal. 256
- Nurparijah Silkika, “*Pengaturan dan Pengawasan Hukum Perizinan di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Pembangunan Gedung Lapangan Tennis)*”, Tesis Universitas Islam Indonesia, Hal.32, 2022
- Andi Rivai Moenta dan Khalil Muslim, “*Penjabaran Prinsip Good Governancedalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Lasinrang Law Jurnal, Vol 1, No 1, Hal 39, Juni 2022
- I Made Sudiarkajaya, “*Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Klungkung*”, Jurnal Cakrawati, Vol 6 No 1 hlm 64, 2023
- Rifqy Maulana, Jamhir, “*Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*”, Jurnal Justisia, Vol 3 No 1, Hlm 95, 2019
- Alvino Ragasya, “*Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah makan Padang salero Enak di Surabaya*” Jurnal Mitra Manajemen, Vol 6 No 6, Hal 351, 2022
- Mataji. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Resmi Honda Ahass Wadung Sari 1475 Sidoarjo*” Jurnal Gempah Ripah : Jurnal Bisnis Vol 4, No. 4, Hal 64, 2024

- Hadi Arnowo “*Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan*” Jurnal Widya Bhumi, Vol. 3 No. 2, Hal 102, 2023
- Situngkir R, “*Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 665
- Gilang Pratama, “*Analisis Yuridis Perbanfingan izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung Dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja*”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Vol. 4 No. 3 2024, Hlm 368
- Pujo Darmo “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah*” Deepublish 2019. Hlm 12
- Cris Kuntadi “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan : Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review)*” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol. 4 No. 2, 2022, Hlm. 146
- Faridah Nur “*Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Masalah Mursalah*” Repository Uin Fas Bengkulu, 2024, Hlm. 21
- Endi Mardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2020, hlm. 24-25
- Janpatar Simamora “*Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan di Indonesia*” Jurnal Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 3 , No. 01, 2022, Hlm. 63

Vini Fitriani “*Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pelaksana Pendidikan Islam Di Lingkungan kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara*” Journal of Islamic Education Policy Vol. 5 No. 2 Hal. 126. 2020

Tasbir Rais “*Negara Hukum Indonesia : Gagasan dan Penerapannya*” Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 16.

Suyatno, “*Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia*”. Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol. 2 No. 1, 2023. Hal. 199.

Internet

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
<http://dpmptsp.kuningankab.go.id/v2/index.php/visi-misi-dan-motto-pelayanan/#:~:text=VISI%20Terwujudnya%20pelayanan%20perizinan%20yang%20mudah%2C%20partisipatif%2C%20akuntabel,pelayanan%20yang%20memiliki%20komitmen%20tinggi%20dan%20bertanggung%20jawab%3B> diakses 9 juni 2024

Eki Nurhuda Almutaqin. “Soal Perizinan Usaha Di Palutungan, Ini Kata Sekdis PUTR.” KuninganMass, 2023. <https://kuninganmass.com/soal-perizinan-usaha-di-palutungan-ini-kata-sekdis-putr/>.

Mustawan, Agus. “Tak Berizin, Bangunan Dua Lantai Disegel.” KuninganMass, 2019. <https://kuninganmass.com/tak-berizin-bangunan-dua-lantai-disegel/>.

Umam, Deden Rijalul. “Investasi Di Kuningan Boleh, Tapi Harus Pro Lingkungan.” KuninganMass, 2020. <https://kuninganmass.com/investasi-di-kuningan-boleh-tapi-harus-pro-lingkungan/>.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar *"Laporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Triwulan 1 Tahun 2022"*, Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)-data telah diolah kembali, 2022

Muchlisin Riadi ,*"Lokasi Usaha (Pengertian, Tujuan, Jenis, Aspek dan Faktor Pemilihan)"* Kajianpustaka, 2022
<https://www.kajianpustaka.com/2020/12/lokasi-usaha.html> diakses pada 18 Oktober 2024 pukul 17.54

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS.539 DPMPTSP/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu